



Judul : Pemilu 2024 : KPU Deteksi 616.743 Pemilih Ganda
Tanggal : Rabu, 19 April 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

PEMILU 2024

KPU Deteksi 616.743 Pemilih Ganda

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum menetapkan daftar pemilih sementara Pemilihan Umum 2024 sebanyak 205.853.518 pemilih. Namun, jumlah pemilih di DPS itu dipastikan akan berkurang karena terdeteksi ada 616.743 pemilih tercatat ganda.

Seusai Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS Tingkat Nasional Pemilu 2024, Selasa (18/4/2023), di Kantor KPU, Jakarta, anggota KPU, Betty Epsilon Idroos, mengatakan, dengan terdeteksinya 616.743 pemilih yang tercatat ganda, KPU akan memperbaiki DPS. Dengan demikian, bisa diperoleh data pemilih yang valid.

Dalam rapat pleno tersebut disebutkan bahwa dari hasil rekapitulasi, jumlah pemilih yang masuk DPS Pemilu 2024 sebanyak 205.853.518 pemilih. Angka itu termasuk pemilih yang terdeteksi ganda. Pemilih itu terbagi 102.847.040 laki-laki dan 103.006.478 perempuan. Mereka akan memilih di 820.273 tempat pemungutan suara (TPS) dalam negeri dan 3.014 TPS di luar negeri.

"Angka 205 juta ini masih merupakan angka yang bergerak sampai kami menetapkan DPT (daftar pemilih tetap) pada 21 Juni 2023," ucap Betty.

Betty menjelaskan, kegandaan pemilih ditemukan pada dua data pemilih dengan nama dan nomor induk kependudukan (NIK) yang identik, tetapi setiap data itu tercatat di TPS berbeda. Sebagai contoh, satu data tercatat di TPS sesuai ala-

mat di kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dan satu lagi tercatat di TPS khusus, seperti di pesantren dan lembaga pemasyarakatan. Kegandaan juga terdeteksi pada pemilih yang berdomisili di luar negeri.

Kegandaan tersebut belum bisa dihapus saat ini dan mesti dilakukan saat perbaikan. Di masa perbaikan yang berlangsung selama dua pekan ke depan, data pemilih masih akan di-*cross check* antar-kabupaten/kota dan di luar negeri sehingga semua kegandaan bisa terdeteksi. Bagi data pemilih yang tercatat di dua TPS berbeda, pemilih akan diminta menentukan salah satu TPS untuk menggunakan hak pilihnya di pemilu sehingga data di TPS lain akan dihapus.

Menurut Betty, jumlah pemilih yang mencapai 205 juta dalam DPS tersebut telah melalui pencocokan dan penelitian sehingga ada sejumlah data pemilih yang telah dihapus. Menurut dia, penghapusan itu diterapkan pada delapan jenis pemilih dengan kategori tidak memenuhi syarat. Hal itu di antaranya pemilih yang meninggal yang jumlahnya mencapai 3,7 juta.

Ia mengimbau agar setiap warga mengecek namanya terdaftar sebagai pemilih di Pemilu 2024 melalui laman cek.dptonline.kpu.go.id atau di DPS yang dipasang di setiap kantor kelurahan.

Jika belum tercatat, masyarakat bisa segera melapor ke petugas pemungutan suara

(PPS) setempat.

Ikut mencermati

Saat memimpin rapat pleno, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyampaikan, penyusunan DPS melibatkan 128 dari 130 kantor perwakilan RI di luar negeri. Kantor perwakilan di Prongyang (Korea Utara) dan Kabul (Afghanistan) tidak melaksanakan penyusunan DPS karena alasan keamanan dan politik negara setempat.

Salinan DPS, menurut Hasyim, telah diserahkan ke setiap partai politik peserta Pemilu 2024. Setiap parpol telah diminta ikut mencermati data tersebut. Hingga 14 hari mendatang, KPU akan mencermati data itu sehingga bisa diperoleh DPS hasil perbaikan (DPSHP).

Sebagai gambaran, pada Pemilu 2019, setelah dilakukan perbaikan ketiga pada DPS, diperoleh DPT sebanyak 192.770.611 pemilih.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan, KPU harus memberi tahu Bawaslu jika ada perubahan data di berita acara yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka. Dari hasil pemantauan, ada tujuh kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang mengubah berita acara rekapitulasi DPS yang telah ditetapkan pada 5 April tanpa mengundang ataupun memberi tahu Bawaslu setempat, di antaranya Musi Banyuasin. Perubahan tersebut berdampak pada jumlah TPS hingga jumlah pemilih keseluruhan. (SYA/Z01)